

PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Oleh:

M. Fadhil Junery, S.EI., M.E,Sy

Dosen STIE Syariah Bengkalis

Prodi Akuntansi Syariah

Dan

Abdullah Aziz, S.Akun

Email: longfadhil@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how much influence superiors support, clarity of purpose and training on the implementation of regional financial accounting systems in the work unit of Bengkalis regency. The type of data from this study is quantitative descriptive using primary and secondary data. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study are the influence of organizational behavioral factors with a percentage value of 0.677 or 67.7% and the remaining 32.3% is influenced by other variables, namely the Regional Supervision Agency, internal control system, and organizational culture. This research is the latest research in Bengkalis Regency and can be a reference for further research.

Keywords: *Factors of Organizational Behavior, Implementation of Regional Financial Accounting Systems*

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *powershare* pada setiap level pemerintahan serta menuntun kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan.¹

Sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota

¹Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih, "Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Benefita* 2(3), 2017, h. 180.

Perhitungan anggaran. Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang andal. Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi disebut dengan perilaku organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan: “serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.²

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis khususnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis mengungkapkan bahwa kantor atau dinas telah memberikan kesempatan kepada pegawai khususnya bagian keuangan untuk mengikuti pelatihan tentang sistem akuntansi keuangan daerah namun masih banyak yang belum memahami sistem tersebut.³ Pemerintah daerah menghadapi kesulitan untuk mengimplementasikan sistem tersebut. Kemungkinan hambatan utama atas keberhasilan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah adalah kurangnya perhatian atas faktor-faktor implementasi selama implementasi berlangsung.⁴

²Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

³ Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkalis, pada hari Rabu, 18 April 2018.

⁴ Siti Nurlela, Rahmawati, “Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Subosukawonosraten”, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 2010, h. 5.

Sistem akuntansi pada organisasi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purposes financial statements*), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.⁵

Landasan Teori

1. Pengertian Keperilakuan Organisasi

Teori atau ilmu perilaku organisasi (*organization behavior*) pada hakekatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri (akar ilmu psikologi), yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua komponen pokok, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut.⁶

Perilaku organisasi sebagai pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Sikap seseorang dalam merespon suatu inovasi seperti di implementasikannya sistem akuntansi keuangan daerah berbeda-beda. Perilaku Organisasi (*Organizational Behavior*) adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi). Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi, dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri serta perilaku organisasi. Perilaku keorganisasian merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur dan proses dalam organisasi.⁷

Islam mengajarkan tentang perilaku organisasi yang baik, dalam Q.S. As-Saff ayat 4⁸

⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi. 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.84

⁶ Handoko, T. Hani. *Manajemen*, Edisi Kedua. (BPFE: Yogyakarta, 2000), h. 41.

⁷ <https://sylvianne.wordpress.com/2015/05/11/apakah-perilaku-organisasi-itu/> Diakses pada hari Senin, 19 Maret 2017. Pukul 11.46

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: C.V Darus Sunnah, 2002), h. 567.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (Q.S. As-Saff : 4)

Organisasi harus mempunyai anggota yang terdiri dari kumpulan orang-orang, berada dalam suatu wadah, terdapat keteraturan, mempunyai tujuan, juga mempunyai pemimpin, terjadi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta ada niat melaksanakan tugas dengan ikhlas dan berjuang di jalan Allah. Organisasi ideal harus mempunyai elemen Ketaatan anggota, keteladanan pemimpin, tujuan organisasi. Dalam pengambilan keputusan memakai sistem musyawarah. Sedangkan untuk menuju organisasi yang bermutu, organisasi harus menjalankan pilar-pilar mutu.

2. Faktor Keperilakuan Organisasi

Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan.⁹

a. Dukungan Atasan

Dukungan atasan merupakan dukungan dari atasan (Pemda) untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi SIKD, dan hubungannya dengan kemajuan dan efisiensi. Chenhall mengungkapkan bahwa dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Untuk mengukur dukungan atasan maka digunakan indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi atasan dalam bekerja, merupakan tindakan nyata dari atasan yang ikut bekerja bersama-sama anggota organisasi lainnya.
- 2) Motivator, di dalam sebuah organisasi pimpinan adalah seorang motivator yang mendorong bawahannya untuk dapat mencapai sasaran atau target yang telah disepakati.
- 3) *Reward* merupakan penghargaan yang diberikan atasan ketika karyawan atau bawahan dapat mencapai sasaran atau target yang direncanakan.

b. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan akan mendorong organisasi untuk melakukan perencanaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Transparansi sasaran merupakan keterbukaan di dalam perusahaan kepada setiap anggota organisasi tentang adanya sebuah tujuan yang harus dicapai.
- 2) Perencanaan adalah rangkaian kegiatan atau prosedur yang dapat dilakukan karyawan dalam mencapai tujuan.
- 3) Target, merupakan standar sasaran yang dibebankan kepada masing-masing anggota organisasi.
- 4) Pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan manajemen terhadap anggota organisasi dalam mencapai tujuan.

⁹Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih, “Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”,... h. 185-187.

5) Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada karyawan yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur atau standar yang diharuskan perusahaan.

Teori tentang tujuan menyatakan bahwa penerimaan dapat ditingkatkan dan individu akan melakukan beberapa upaya untuk membuat item itu bekerja jika mereka diberi tujuan khusus. Kejelasan tujuan diartikan ketika akan menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, tujuan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tersebut telah dijelaskan dan disepakati. Kejelasan tujuan memberikan gambaran ketika akan mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Tujuan implementasi sistem tersebut harus jelas dan ringkas, dan telah ada persetujuan tentang tujuan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, serta Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bermanfaat untuk semua bagian dalam departemen/dinas.

c. Pelatihan

Pelatihan adalah suatu kegiatan peningkatan kemampuan karyawan atau pegawai dalam suatu institusi, sehingga pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku bagi karyawan atau pegawai.¹⁰ Pelatihan berkaitan dengan implementasi, desain dan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dapat memberikan mekanisme bagi pengguna untuk memahami dan menerima dasar dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Untuk mencapai program pelatihan, maka harus memperhatikan sasaran yang jelas, memakai tolok ukur terhadap hasil yang dicapai. Pelatihan harus diberikan oleh tenaga pengajar yang kompeten, yang mampu menyampaikan ilmunya dengan baik, serta dapat memotivasi peserta pelatihan dengan baik.

Pengukuran hasil program pelatihan didasarkan pada empat kategori yaitu:

- 1) Reaksi, mengevaluasi bagaimana reaksi orang yang dilatih terhadap program.
- 2) Pembelajaran, melakukan pengujian terhadap sesuatu yang telah dipelajari sesuai dengan prinsip, keterampilan dan fakta yang seharusnya.
- 3) Perilaku, melihat kembali bagaimana perilaku seseorang yang telah menyelesaikan pelatihan.
- 4) Hasil, mengevaluasi keseluruhan dari hasil akhir setelah dilakukannya pelatihan.¹¹

Pembahasan

1. Pengaruh dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui untuk variabel dukungan atasan (X1) nilai $t_{hitung} (0,726) < t_{tabel} (1,988)$ dengan signifikan $(0,470) > (0,05)$. Maka H_a

¹⁰ Notoatmodjo, S. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*,... h. 23.

¹¹ Darmawan, D. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*, (Surabaya: PT. Jepe Press Media Utama, 2013), h. 40.

ditolak. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Pengaruh kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah

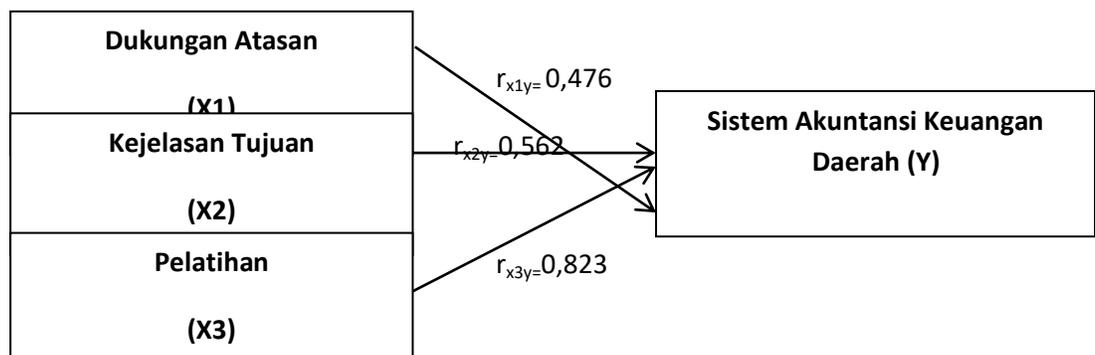
Berdasarkan uji t, dapat diketahui untuk variabel kejelasan tujuan (X2) nilai t_{hitung} (1,290) < t_{tabel} (1,988) dengan signifikan (0,200) > (0,05). Maka H_a ditolak. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

3. Pengaruh pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah

Berdasarkan uji t, dapat diketahui untuk variabel pelatihan (X3) nilai t_{hitung} (9,730) > t_{tabel} (1,988) dengan signifikan (0,000) < (0,05). Maka H_a diterima. Artinya secara parsial ada pengaruh antara pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Gambar 1 Hasil Analisa Data

Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah



Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dilihat pengaruh dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan uji t. Dapat diketahui untuk nilai t_{hitung} (0,726) < t_{tabel} (1,988) dengan signifikan (0,470) > (0,05). Maka H_a ditolak. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan persentase sumbangan pengaruh dukungan atasan sebesar $0,476 = 47,6\%$ sedangkan sisanya $52,4\%$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Dukungan atasan tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, karena kurangnya dukungan dari atasan hal ini disebabkan karena pegawai di bagian keuangan tidak secara langsung berhubungan dengan atasan.

Apabila dukungan atasan terhadap pegawai tidak ada sama sekali bahkan pegawai merasa tidak dihargai maka akan berdampak negatif bagi implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap instansi itu sendiri.

Berdasarkan gambar hasil analisa data di atas dapat dilihat pengaruh kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan uji t. Dapat diketahui untuk nilai $t_{hitung} (1,290) < t_{tabel} (1,988)$ dengan signifikan $(0,200) > (0,05)$. Maka H_a ditolak. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan persentase sumbangan pengaruh kejelasan tujuan sebesar 0,562 atau 56,2%, sedangkan sisanya 43,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, karena ketika akan mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah, tujuan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah tersebut belum terlalu dijelaskan dan disepakati bersama. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah akan berhasil apabila tujuan dari implementasi sistem akuntansi keuangan daerah telah dijelaskan dan telah disepakati serta sistem akuntansi keuangan daerah bermanfaat untuk semua bagian dalam SKPD tersebut.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Caesilia pada tahun 2015, yang menyimpulkan hasil bahwa kejelasan tujuan berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan nilai t hitungnya 5.816.

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas dapat dilihat pengaruh pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan uji t. Dapat diketahui untuk nilai $t_{hitung} (9,730) > t_{tabel} (1,988)$ dengan signifikan $(0,000) < (0,05)$. Maka H_a diterima. Artinya secara parsial ada pengaruh antara pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan persentase sumbangan pengaruh pelatihan sebesar 0,823 atau 82,3%, sedangkan sisanya 17,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan sangat berpengaruh dalam pengimplementasian sistem akuntansi keuangan daerah, karena pelatihan merupakan faktor penting bagi pengguna sistem tersebut, dengan adanya pelatihan yang dilakukan di SKPD Kabupaten Bengkalis, maka akan meningkatkan keberhasilan karyawan dan manajer yang ada di dalamnya. Selain itu jika tidak adanya pelatihan, maka berakibat sistem tidak dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, sehingga tujuan instansi sulit untuk dicapai

Untuk melihat pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah digunakan uji f atau simultan. Dapat diketahui untuk nilai $F_{hitung} > F_{tabel} (67,366 > 3,09)$ maka hipotesis ditolak (H_a diterima), dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$ artinya dukungan atasan (X_1), kejelasan tujuan (X_2), dan pelatihan (X_3), berpengaruh secara simultan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (Y).

Variabel yang berpengaruh dominan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diketahui bahwa

variabel yang berpengaruh dominan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah variabel pelatihan, ini terbukti dari besarnya nilai *Standardized Coefficient* Beta variabel pelatihan 0.739 yang mana lebih besar dari koefisien variabel independent yang lain.

Kesimpulan

Pengaruh dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat diketahui untuk nilai $t_{hitung} (0,726) < t_{tabel} (1,988)$ dengan signifikan $(0,470) > (0,05)$. Maka H_a ditolak. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Pengaruh kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat diketahui untuk nilai $t_{hitung} (1,290) < t_{tabel} (1,988)$ dengan signifikan $(0,200) > (0,05)$. Maka H_a ditolak. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Pengaruh pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat diketahui untuk nilai $t_{hitung} (9,730) > t_{tabel} (1,988)$ dengan signifikan $(0,000) < (0,05)$. Maka H_a diterima. Artinya secara parsial ada pengaruh antara pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat diketahui untuk nilai $F_{hitung} > F_{tabel} (67,366 > 3,09)$ maka hipotesis ditolak (H_a diterima), dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$ artinya dukungan atasan (X_1), kejelasan tujuan (X_2), dan pelatihan (X_3), berpengaruh secara simultan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (Y).

Variabel yang berpengaruh dominan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis adalah variabel pelatihan, ini terbukti dari besarnya nilai *Standardized Coefficient* Beta variabel pelatihan 0.739 yang mana lebih besar dari koefisien variabel independent yang lain

Daftar Pustaka

- Baridwan, Zaki. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode Edisi Kelima*. Yogyakarta: BPF. 2012.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF. 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Darmawan, D. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: PT. Jepe Press Media Utama. 2013.
- Erlina. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat. 2015.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi. 3*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- .Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

- Hendriksen, Eldon S. *Teori Akuntansi*. Terj. Marianus Sinaga. Jakarta: Erlangga. 1999.
- Krismiaji. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2010.
- Mulyadi. *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Notoatmodjo, S. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nur Afiah, Nunuy. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sujarweni, V, Wiratna. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Batu Press. 2015.
- Tanjung, Abdul Hafis. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Caecilia Henny Setya Wati, Semuel Batlajery, “*Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Merauke*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Volume VI No. 1, April 2015
- Rheny Afriana Hanif, R. Adri Satriawan Dan Triyanto Hadi Saputra. “*Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Dengan Konflik Kognitif Dan Afektif Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Rumah Sakit Pemerintah Di Kota Pekanbaru*”. *Jurnal Ekonomi* Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.
- Siti Nurlela, Rahmawati. “*Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Subosukawonosraten*”. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*.
- Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih. “*Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*”. *Jurnal Benefita* 2(3) Oktober 2017 (179-193)
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.